

## Analisis Sistem, Problematika, Dan Kebijakan Pendidikan Di Brunei Darussalam Serta Perbandingan Dengan Pendidikan Di Indonesia

**Ika Kurnia Sofiani**

STAIN Bengkalis

[Ikur.wafie@gmail.com](mailto:Ikur.wafie@gmail.com)

**Mazlin**

STAIN Bengkalis

[Mazlinjulira3@gmail.com](mailto:Mazlinjulira3@gmail.com)

**Nuratika**

STAIN Bengkalis

[nuratikanoy14@gmail.com](mailto:nuratikanoy14@gmail.com)

**Sofia Erlinda**

STAIN Bengkalis

[Sofiaerlinda84@gmail.com](mailto:Sofiaerlinda84@gmail.com)

**Pebriardi Surya Pamungkas**

STAIN Bengkalis

[pebriardisuryapamungkas23@gmail.com](mailto:pebriardisuryapamungkas23@gmail.com)

Alamat: Jl. Lembaga, Sengoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi: [Ikur.wafie@gmail.com](mailto:Ikur.wafie@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the education system, identify the problems faced, and analyze education policies in Brunei Darussalam, with a special comparison to education in Indonesia. Brunei Darussalam and Indonesia have different cultural, social, economic and political contexts, which influence the structure and implementation of their education systems. The research method used is descriptive and comparative analysis, utilizing secondary data from various literature sources, policies and educational reports. The results of the analysis show that Brunei Darussalam's education system is unique, with a focus on Islamic education and national values. However, several problems such as gaps in educational access and teaching quality are still challenges. On the other hand, Indonesia has a more complex education system with various challenges, including regional disparities, teacher quality, and limited educational infrastructure. A comparison between the two countries highlights differences in policy approaches, educational structures, and challenges faced. Brunei Darussalam emphasizes quality education and strengthening national identity, while Indonesia struggles with the challenges of inclusion and social inequality. The implication of this analysis is the importance of understanding the local context in designing educational policies that are effective and relevant to the needs of local communities. This study provides insight for policy makers to improve the education system and improve the quality of education in both countries.*

**keywords :** *System analysis. Problems. Education policy. Brunei Darussalam. Indonesian Education.*

**Abstrak:** Studi ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendidikan, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, dan menganalisis kebijakan pendidikan di Brunei Darussalam, dengan perbandingan khusus terhadap pendidikan di Indonesia. Brunei Darussalam dan Indonesia memiliki konteks budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, yang mempengaruhi struktur dan pelaksanaan sistem pendidikan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber literatur, kebijakan, dan laporan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pendidikan Brunei Darussalam memiliki keunikan tersendiri, dengan fokus pada pendidikan Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Namun, beberapa problematika seperti kesenjangan akses pendidikan dan kualitas pengajaran masih menjadi tantangan. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lebih kompleks dengan beragam tantangan, termasuk kesenjangan regional, kualitas guru, dan infrastruktur pendidikan yang terbatas. Perbandingan antara kedua negara menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan, struktur pendidikan, dan tantangan yang

Received: Juni 30, 2024; Accepted: Juli 31, 2024; Published: Agustus 31, 2024

\* Ika Kurnia Sofiani, [Ikur.wafie@gmail.com](mailto:Ikur.wafie@gmail.com)

dihadapi. Brunei Darussalam menekankan pada kualitas pendidikan dan penguatan identitas nasional, sementara Indonesia berjuang dengan tantangan inklusi dan kesenjangan sosial. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya memahami konteks lokal dalam merancang kebijakan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Studi ini memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di kedua negara.

**Kata Kunci :** Analisis sistem. Problematika.Kebijakan pendidikan.Brunei Darussalam. Pendidikan Indonesia.

## LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan penanda penting dalam menilai kemajuan atau kemunduran suatu negara. Melalui pendidikan, individu dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kualitas tinggi, kompeten dalam berbagai bidang, serta berakhlak dan berwatak baik. Oleh karena itu, tingkat kemajuan suatu bangsa dapat tercermin dari kualitas sumber daya manusianya. Konsep sumber daya manusia (SDM) merujuk pada sekelompok individu dalam suatu organisasi yang berkontribusi pada aktivitas organisasi, atau semua keterampilan atau potensi yang dimiliki oleh penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Ini mencakup karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi mereka yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.

Pendidikan menjadi faktor penentu serta penunjuk awal dalam perkembangan suatu negara. Dari pendidikan lahirlah individu yang memiliki kualitas tinggi, kompeten dalam berbagai bidang, dan memiliki integritas moral yang baik. Karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikannya. Konsep sumber daya manusia (SDM) merujuk pada keseluruhan individu yang berkontribusi terhadap kemajuan suatu organisasi, atau potensi manusia yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu.

Pentingnya pendidikan tak terbantahkan, karena melalui pendidikanlah kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dapat diukur. Pendidikan berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul secara spiritual, intelektual, dan keterampilan, serta menjadi tonggak dalam pembentukan generasi penerus bangsa. Kegagalan dalam mencapai hasil pembelajaran dapat menghambat kemajuan, mengingat pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan. Dalam upaya mencapai kemajuan, penting bagi suatu bangsa untuk memperhatikan kualitas pendidikan, yang juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan bangsa itu sendiri. Namun, penting untuk diakui bahwa setiap negara memiliki konteks pendidikan yang unik, termasuk dalam hal sejarah, sistem pendidikan, dan politik yang memengaruhi arah pembangunannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, sebagai negara-negara dengan landasan Islam, selalu mengikuti perkembangan pendidikan demi mencapai tujuan bersama. Sistem pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sistem pendidikan menengah pertama. Namun, perbedaannya terletak pada sistem pendidikan menengah atas dan penggunaan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. Brunei Darussalam menerapkan sistem pendidikan dengan pola A7-3-2-2 yang mencerminkan durasi studi untuk setiap tingkat pendidikan. Pola ini meliputi 7 tahun untuk tingkat dasar, 3 tahun untuk tingkat menengah pertama, 2 tahun untuk tingkat menengah atas, dan 2 tahun untuk tingkat pra universitas.

Dalam tulisan ini, penulis menggambarkan perbandingan sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman akan pendidikan Islam secara makro, yang pada gilirannya akan menjadi pengetahuan yang berharga dalam upaya meningkatkan pendidikan nasional.

## **KAJIAN TEORI**

Problematika berasal dari kata "*problem*" yang mengacu pada permasalahan atau masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*problem*" diartikan sebagai "hal-hal yang masih belum dipecahkan". Sementara itu, "masalah" sendiri, menurut KBBI, merujuk pada "sesuatu yang harus diselesaikan". Dengan demikian, dalam konteks ini, "problematika" atau "masalah" mengacu pada situasi di mana ada ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi, yang membutuhkan penyelesaian atau solusi untuk mencapai konsistensi antara teori dan praktik.

Secara bahasa, "kebijakan" merupakan terjemahan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris yang memiliki arti "kebijakan". Di bahasa Inggris, "*policie*" memiliki makna mengurus kepentingan publik atau administrasi pemerintah. Konsep kebijakan juga ditemukan dalam bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Latin, kebijakan disebut sebagai "*politeia*" yang berarti pemerintahan yang ditetapkan, dibuat, dan diikuti oleh suatu pemerintah. Sementara dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut sebagai "*polis*" yang merujuk pada negara kota. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kebijakan disebut sebagai "*pur*" yang memiliki arti kota.

Brunei Darussalam, sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dikenal karena kemakmurannya yang signifikan. Negara ini, yang menjadi anggota keenam dari ASEAN, memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984.

Sistem pendidikan di Indonesia mencakup tiga tingkat utama: pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar dimulai dengan sekolah dasar (SD) yang berlangsung selama enam tahun, diikuti oleh sekolah menengah pertama (SMP) yang berlangsung selama tiga tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berlangsung selama tiga tahun juga. Sedangkan pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi dan universitas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam survei ini adalah metode kualitatif, yang mencakup telaah dokumen. Dalam terminologi yang didefinisikan oleh Creswell, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kepustakaan yang melibatkan peninjauan jurnal, buku, laporan penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis melakukan dua langkah utama: Pertama, melakukan pencarian literatur yang sesuai dengan materi penelitian. Kedua, setelah mengumpulkan data, penulis menganalisis data sesuai dengan pemahaman yang dimiliki penulis selama penelitian ini dilakukan.

Secara mendasar, penelitian Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan tindakan manusia. Peneliti tidak berupaya mengukur atau menghitung data kualitatif yang telah dikumpulkan, sehingga tidak melibatkan analisis angka-angka.

Metode penelitian ini mengaplikasikan analisis isi deskriptif dan studi teks, dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka ini melibatkan usaha dalam mencari dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **A. Pendidikan di Brunei Darussalam**

### **1. Profil Negara Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam, sebuah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan kemakmurannya, menjadi anggota keenam ASEAN setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Negara ini dipimpin oleh seorang Sultan yang juga menjabat sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Meskipun Sultan memiliki wewenang yang luas sesuai dengan Konstitusi, sistem pemerintahan Brunei Darussalam dijalankan secara demokratis. Namun, dalam hal seleksi birokrat, Brunei cenderung menggunakan sistem rekrutmen tertutup yang tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Brunei Darussalam adalah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan sebagai kepala pemerintahan.

Brunei memiliki dua pertiga dari total populasi penduduknya berasal dari etnis Melayu. Namun, kelompok etnik minoritas yang dominan dalam perekonomian negara ini adalah orang Tionghoa (Han), yang menyumbang sekitar 15% dari total populasi. Kedua kelompok etnis ini juga mencerminkan pentingnya bahasa dalam masyarakat Brunei, dengan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa Tionghoa yang juga signifikan. Bahasa Inggris juga digunakan secara luas, sementara terdapat komunitas ekspatriat yang cukup besar, termasuk warga negara Britania dan Australia. Islam diakui sebagai agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei juga menjadi kepala agama negara. Meskipun demikian, terdapat juga penganut agama lain di Brunei, seperti agama Buddha (terutama di kalangan orang Tionghoa), agama Kristen, serta beberapa agama asli yang hanya diikuti oleh komunitas kecil.

Sekitar dua pertiga dari total populasi Brunei adalah orang Melayu (66,3%). Etnis minoritas yang mendominasi perekonomian negara adalah Tionghoa (Han), yang menyumbang sekitar 11,2% dari populasi, diikuti oleh masyarakat adat/hari (3,4%) dan kelompok etnis lain (19,1%). Etnis-etnis ini juga mencerminkan pentingnya bahasa dalam masyarakat Brunei, dengan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, disusul oleh bahasa Cina. Bahasa Inggris juga digunakan secara luas, dan terdapat komunitas ekspatriat yang cukup besar dengan banyak orang Inggris dan Australia. Islam adalah agama resmi Brunei (67%), dan Sultan Brunei juga merupakan kepala agama negara. Selain Islam, terdapat juga agama Buddha (13%), terutama di kalangan orang

Tionghoa, agama Kristen (10%), dan beberapa agama asli yang hanya diikuti oleh komunitas kecil (10%).

## **2. Sistem Pendidikan Di Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam, sebuah negara di Asia Tenggara yang sangat makmur, dipimpin oleh seorang Sultan yang juga menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam menekankan pentingnya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sejarah pendidikan formal di Brunei dimulai pada tahun 1912 dengan dibukanya Sekolah Melayu di Bandar Brunei (kini Bandar Seri Begawan). Selanjutnya, berbagai sekolah didirikan di wilayah Brunei Muara, Kuala Belait, dan Tutong. Sebelumnya, pada tahun 1916, komunitas Tionghoa juga mendirikan sekolah mereka sendiri di Bandar Seri Begawan.

Pada tahun 1966, sebuah sekolah Melayu di tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Pada tahun 1979, pendidikan taman kanak-kanak (TK), yang merupakan bagian dari tingkat dasar, mulai diperkenalkan di Brunei. Universitas Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1985 sebagai institusi pendidikan tinggi tertinggi di negara tersebut. Sejak tahun 1984, kurikulum pendidikan nasional mewajibkan siswa untuk menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Bahasa Melayu digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti bahasa Melayu, pengetahuan Agama Islam, pendidikan jasmani, seni lukis, dan kerajinan tangan. Sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematika, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris itu sendiri.

Sejak tahun 2008, Brunei telah memulai transisi ke sistem pendidikan baru yang dikenal sebagai SPN21, singkatan dari Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21. SPN21 adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan dan pengakuan bagi para siswa untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik individu mereka. Misi Kementerian Pendidikan adalah untuk memberikan pendidikan yang holistik guna mencapai potensi penuh bagi semua siswa. Sistem ini mulai diterapkan pada siswa tahun 7 (menengah pertama) pada tahun pelajaran 2008, yang merupakan siswa lulusan ujian PSR 2007 (mirip dengan ujian nasional SD). Kemudian, pada tahun 2009, dilakukan transisi bagi siswa tahun 1 dan tahun 4 ke sistem ini, dan akan sepenuhnya diterapkan pada tingkat dasar pada tahun 2011.

**a. Pra pendidikan**

Anak-anak yang berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki tahap pra-pendidikan dasar. Bahkan, di lembaga pendidikan pra-sekolah swasta, anak-anak dapat masuk pada usia di bawah 3 tahun. Kurikulum pada tingkat ini mencakup kelas-kelas dasar dalam bahasa, aritmatika, kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani, dan pengembangan bakat, yang diajarkan dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran. Pembelajaran berlangsung secara informal tanpa alokasi waktu khusus per mata pelajaran, karena pengajaran terintegrasi dan dilakukan melalui aktivitas anak-anak.

**b. Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar menurut SPN21 dibagi menjadi dua tingkat: tingkat bawah (tahun 1 hingga tahun 3) dan tingkat atas (tahun 4 hingga tahun 6). Seluruh siswa mengikuti kurikulum yang sama dari tahun 1 hingga tahun 3. Siswa yang ingin masuk ke sekolah Arab harus lulus ujian masuk sekolah Arab pada tahun 4. Ketika menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk siswa yang mengikuti sekolah Arab, semua siswa harus mengikuti ujian penilaian sekolah rendah (PSR) sebelum melanjutkan ke sekolah menengah. Siswa yang tidak lulus PSR akan mengikuti ujian pengulangan.

**c. Pendidikan Menengah:**

Menurut SPN21, pendidikan menengah memiliki durasi 4 atau 5 tahun. Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama dari tahun 7 hingga tahun 8. Pada akhir tahun 8, para siswa mengikuti ujian penilaian menengah. Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan siswa tersebut, mereka akan diarahkan ke dalam program pendidikan menengah umum selama 4 atau 5 tahun (tahun 9 hingga tahun 10 atau tahun 9 hingga tahun 11), atau program pendidikan terapan selama 5 tahun (tahun 9 hingga tahun 11). Selain itu, ada juga program pendidikan khusus yang ditujukan untuk siswa berbakat atau berkecerdasan tinggi dalam bidang olahraga, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa. Terdapat juga program pendidikan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti gangguan penglihatan dan pendengaran, cacat mental, cacat fisik, atau kesulitan belajar.

Siswa diberikan kesempatan untuk beralih antara program-program tersebut, misalnya dari program pendidikan 4 tahun ke program pendidikan menengah, atau sebaliknya, namun tetap dengan mempertimbangkan hasil pembelajaran dan

persyaratan yang ditetapkan. Siswa yang akan menyelesaikan pendidikan menengah akan mengikuti ujian BCGCE pada akhir tahun 10 untuk program pendidikan menengah 4 tahun, atau akhir tahun 11 untuk program pendidikan menengah 5 tahun.

**d. Pasca Pendidikan Menengah**

1. Technical College.
2. Sekolah Kejuruan.

**e. Pendidikan Tinggi**

1. *Technical & Engineering Colleges*.
2. Perguruan Tinggi Keperawatan Pengiraan Anak Putri Rashidah.
3. Institut Teknologi Brunei (ITB).
4. Universitas Brunei Darussalam

**f. Problematika Pendidikan di Brunei Darussalam**

Beberapa problematika yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Brunei Darussalam meliputi:

1. Kesenjangan Pendidikan

Meskipun Brunei memiliki sistem pendidikan yang berkembang, masih ada kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok etnis atau ekonomi yang berbeda.

2. Kurangnya Tenaga Pengajar Berkualitas

Brunei mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, terutama di bidang-bidang yang spesifik dan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

3. Relevansi Kurikulum

Dalam menghadapi perubahan global dan kemajuan teknologi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan di Brunei tetap relevan dan mempersiapkan siswa untuk tuntutan dunia kerja yang terus berubah.

4. Pengintegrasian Teknologi dalam Pendidikan

Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran, masih ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran.

5. Pendidikan Inklusif

Meningkatkan akses dan pendidikan yang inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus adalah sebuah tantangan. Ini mencakup pembangunan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai.

6. Pembangunan Profesionalisme Guru

Penting untuk terus meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, sehingga mereka dapat memberikan pengajaran yang berkualitas dan mendukung perkembangan holistik siswa.

7. Peningkatan Partisipasi dan Retensi Siswa

Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan retensi siswa di sekolah, termasuk masalah seperti kurangnya motivasi, dukungan sosial, atau tantangan akademik.

8. Pembiayaan Pendidikan

Memastikan pembiayaan yang memadai untuk pendidikan adalah faktor kunci dalam memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini mencakup alokasi dana yang cukup untuk infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum.

**g. kebijakan Pendidikan di Brunei Darussalam**

Pendidikan Islam dipahami sebagai upaya komprehensif untuk membentuk siswa menjadi umat Islam yang berkembang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Seiring dengan perkembangan ini, mulai muncul lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam terpadu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara, dengan masing-masing negara membentuk pola pendidikan Islam sesuai konteksnya.

Di Brunei Darussalam, sistem pendidikan di Balai dilaksanakan dua kali lipat, yaitu untuk pengajaran umum dan khusus. Balai sendiri merupakan fasilitas khusus tempat belajar bagi anak-anak. Pengajaran umum terbuka untuk masyarakat tanpa batasan sosial atau usia tertentu, sementara pengajaran khusus diikuti oleh kelompok tertentu seperti pegawai agama, ulama, kadhi, juru nikah, dan lainnya. Namun, sistem pendidikan di Balai ini terbatas hanya untuk kalangan laki-laki, sementara perempuan mendapatkan pendidikan di rumah masing-masing.

Meskipun demikian, sistem pendidikan informal di Masjid, Balai, dan tempat lain tetap berlanjut di Brunei Darussalam. Namun, dengan pesatnya perkembangan lembaga pendidikan seperti masjid, rumah, dan balai, sistem pendidikan Islam di negara tersebut telah beralih ke sistem formal yang dijalankan melalui sekolah dan diatur oleh pemerintah, khususnya oleh pihak Kerajaan Brunei.

Meskipun sistem formal pendidikan telah diterapkan secara resmi, namun sistem non-formal yang diselenggarakan di masjid, balai, dan tempat lainnya tetap berlangsung. Lembaga pendidikan Islam formal di Brunei mencakup berbagai jenis, seperti sekolah Arab, sekolah agama, tahfizul Quran, Institut Tahfiz Alquran Sultan Hassanul Bolkiah, Institut Pengajian Islam yang dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, serta Fakultas Islamic Studies dan Universitas Brunei Darussalam.

Lembaga-lembaga ini terus berkembang baik dari segi infrastruktur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia, dengan dukungan dan campur tangan besar dari Pemerintah Kerajaan Brunei. Pemerintah Brunei Darussalam sangat memperhatikan pendidikan agama, bahkan menjadi fokus perhatian yang lebih dari Sultan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di negara tersebut.

Pendidikan di Brunei Darussalam memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan negara, dan pemerintah Brunei telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di Brunei Darussalam:

1. Pendidikan Gratis

Pemerintah Brunei menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis bagi semua warga negara Brunei. Ini termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas.

2. Kurikulum Nasional

Brunei memiliki kurikulum nasional yang dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan negara. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, sains, matematika, dan studi Islam.

2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di semua tingkatan pendidikan. Ini termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

3. Pendidikan Teknologi dan Informatika

Pemerintah Brunei telah mengakui pentingnya pendidikan dalam bidang teknologi dan informatika. Inisiatif telah diluncurkan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.

4. Pendidikan Agama

Pendidikan agama, terutama Islam, memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Brunei Darussalam. Materi keagamaan diajarkan di sekolah-sekolah untuk memastikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

5. Pendidikan Tinggi

Brunei memiliki Universitas Brunei Darussalam (UBD) dan Institut Teknologi Brunei (ITB) sebagai lembaga-lembaga pendidikan tinggi utama. Pemerintah terus memperkuat pendidikan tinggi untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing secara global.

6. Pendidikan Kejuruan

Pemerintah juga telah fokus pada pengembangan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

7. Pendidikan Kepemudaan dan Pengembangan Karakter

Selain akademik, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kepemudaan. Berbagai program ekstrakurikuler dan kegiatan di luar kelas diselenggarakan untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan nilai-nilai positif pada siswa.

Kebijakan-kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Brunei Darussalam untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut berkualitas tinggi dan relevan dengan tuntutan zaman, serta untuk menciptakan generasi muda yang terdidik dan siap menghadapi masa depan.

**B. Pendidikan di Indonesia**

**1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia**

Masuknya Islam ke wilayah Nusantara, baik pada gelombang pertama pada abad ke-7 M maupun gelombang kedua pada abad ke-13 M, tidak diikuti oleh

pendirian madrasah. Sebaliknya, lembaga-lembaga pendidikan yang muncul seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, adalah pesantren. Oleh karena itu, pesantren secara historis sering diidentifikasi tidak hanya dengan keislaman, tetapi juga dengan keaslian budaya Indonesia. Karena itu, pembahasan mengenai madrasah di Indonesia seringkali tidak terlepas dari diskusi tentang pesantren sebagai akarnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lanjutan dari pesantren. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan proses historis sebagai hubungan yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lampau dengan kemunculan madrasah di masa mendatang.

Menurut Nurcholish Madjid, lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha di Nusantara. Oleh karena itu, Islam hanya melanjutkan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut. Namun, dalam proses pengislaman itu, terjadi akomodasi dan adaptasi. Lebih lanjut, karena lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren pada masa Hindu-Budha lebih bersifat mistik, ajaran Islam yang disampaikan di pesantren awalnya juga bersifat mistik, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai tasawuf. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, tasawuf menjadi gejala umum dan dominan dalam dunia Islam secara umum. Karena penduduk Nusantara sebelum Islam cenderung menuju ke arah mistik, maka pendekatan mistik atau tasawuf dalam penyampaian agama Islam lebih mudah diterima dan diadopsi.

Menurut Malik Fadjar, pertemuan global dengan pusat Islam di Haramain pada akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terstruktur. Akibatnya, di awal abad ke-20 M, di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang lebih terstruktur, yang dikelola dalam sistem "*madrasi*" yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama "*madrasah*."

Sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia telah mengadopsi sistem sekolah modern dengan beberapa ciri, antara lain penggunaan sistem kelas, pengelompokkan mata pelajaran, penggunaan bangku, dan penyertaan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya.

## **2. Lembaga pendidikan di Indonesia**

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang telah ada sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini meliputi:

### **a. Pesantren**

Merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang fokus pada pendidikan agama dan kehidupan pesantren. Pesantren telah menjadi bagian integral dari budaya pendidikan di Indonesia sejak lama.

Pesantren, menurut kamus Bahasa Indonesia, merujuk pada "asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji". Asal kata "pesantren" berasal dari "*sastri*," suatu istilah yang pada awalnya digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengejar ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura. Kata "*sastri*" kemudian diawali dengan "*pe*" dan diakhiri dengan "*an*," yang mengartikan sebagai tempat di mana santri mengejar ilmu. Dalam penggunaan bahasa modern, "santri" memiliki makna yang sempit dan makna yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih sempit, "santri" merujuk pada pelajar sekolah agama, sementara dalam makna yang lebih luas dan umum, "santri" merujuk pada individu bagian dari penduduk Jawa yang dengan sungguh-sungguh menganut Islam, rajin beribadah, pergi ke masjid pada hari Jum'at, dan sebagainya.

Manfred Ziamek juga menyatakan bahwa secara etimologis, pesantren berasal dari "pesantrian" yang artinya "tempat santri." Selain itu, ada beberapa pandangan terkait asal-usul kata "pesanten." Prof. John berpendapat bahwa kata "pesantren" muncul dari istilah "santri" dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Pendapat lain yang disampaikan oleh C.C. Berg menyatakan bahwa istilah "santri" berasal dari bahasa India, yaitu "*sastri*," yang merujuk kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Namun, menurut Ranson, kata "santri" berasal dari istilah "*sastiri*," yang mengartikan seseorang yang tinggal di rumah miskin atau struktur keagamaan secara umum.

b. Madrasah

Madrasah merupakan institusi pendidikan Islam yang memberikan pendidikan formal dengan kurikulum yang terfokus pada agama Islam, tetapi juga mencakup pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa.

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan madrasah telah mengalami perubahan yang signifikan. Madrasah tidak lagi menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan pesantren. Madrasah mulai memasukkan pelajaran umum dan mengadopsi metode pengajaran yang lebih modern, tidak lagi hanya menggunakan metode tradisional seperti sorogan atau bandongan, tetapi mengikuti model klasikal. Metode pengajaran di madrasah umumnya meliputi hafalan, latihan, dan

praktek, yang merupakan kelanjutan dari masa Rasulullah SAW. Pada masa awal perkembangannya, pendidikan Islam di madrasah menggunakan metode talqin, di mana guru mendikte dan murid mencatat lalu menghafal, dan setelah itu guru menjelaskan maknanya. Metode ini sering disebut sebagai metode tradisional, di mana murid mencatat, menulis materi pelajaran, membaca, menghafal, dan kemudian berusaha memahami arti dan makna dari pelajaran yang diberikan. Seiring perkembangan waktu, pendidikan madrasah berkembang menjadi beberapa jenjang, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Ada juga Madrasah Model yang secara khusus diformulasikan untuk meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika.

c. Sekolah Islam

Sekolah Islam adalah institusi pendidikan yang memberikan pendidikan formal dengan penekanan pada ajaran Islam dalam kurikulumnya. Sekolah ini biasanya menawarkan tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sekolah-sekolah tersebut dapat dianggap sebagai sekolah "elite" Islam karena beberapa alasan mendasar. Menurut Sanaky, salah satu alasannya adalah aspek akademisnya. Dalam beberapa kasus, hanya siswa-siswa terbaik yang dapat diterima di sekolah tersebut. Selain itu, tenaga pengajar (guru) yang mengajar juga harus memenuhi kualifikasi tertentu melalui seleksi yang kompetitif. Manajemen sekolah yang baik juga menjadi faktor pendukung, dengan fasilitas yang memadai dan lengkap seperti perpustakaan, ruang komputer, masjid, dan sarana olahraga.

Menurut Alaydroes, sekolah Islam, termasuk sekolah Islam terpadu, memasukkan nilai-nilai Islam dari berbagai sumber. Ini mencakup pembelajaran agama serta semua mata pelajaran yang diberikan dengan nuansa Islami. Nilai-nilai tersebut tidak hanya ditekankan dalam pembelajaran agama, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Guru-guru yang direkrut memiliki visi dan ideologi yang sejalan, serta diharapkan memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Selain itu, sekolah juga berusaha membentuk perilaku ibadah siswa melalui sholat dan doa, serta mengikuti sunnah.

### C. Perbandingan Problematika Pendidikan di Brunei Darussalam dan Indonesia

Perbandingan Problematika Pendidikan di Brunei Darussalam dan Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci yang memengaruhi sistem pendidikan di kedua negara tersebut. Beberapa aspek yang dapat dibandingkan antara lain:

1. Infrastruktur Pendidikan

Perbandingan dapat dilakukan terkait dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan, seperti jumlah sekolah, fasilitas belajar mengajar, dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di kedua negara.

2. Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Dapat dilihat bagaimana kurikulum pendidikan di kedua negara disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Selain itu, perbedaan dalam metode pembelajaran dan pendekatan pengajaran juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

3. Kualitas Tenaga Pengajar

Kualitas dan kualifikasi guru serta staf pengajar memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas sistem pendidikan. Perbandingan dapat dilakukan terkait dengan kualitas pelatihan guru, penilaian kinerja, dan insentif yang diberikan bagi mereka.

4. Keterlibatan Komunitas dan Orang Tua

Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan juga dapat dibandingkan antara kedua negara. Hal ini mencakup dukungan orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan.

5. Keseimbangan antara Pendidikan Agama dan Sekuler

Mengingat kedua negara memiliki mayoritas penduduk Muslim, perbandingan dapat dilakukan terkait dengan penekanan pada pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan dan bagaimana hal ini seimbang dengan pendidikan sekuler atau non-agama.

6. Tantangan dalam Pendidikan Inklusif

Masalah dan tantangan terkait dengan pendidikan inklusif juga perlu dipertimbangkan. Hal ini mencakup aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum yang inklusif, serta pelatihan bagi guru untuk menghadapi kebutuhan siswa dengan beragam latar belakang.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di Brunei Darussalam serta perbandingannya dengan pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua

negara memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda dalam memajukan sistem pendidikan mereka. Brunei Darussalam, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan pendekatan pendidikan yang lebih terpusat, telah mencapai kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan. Di sisi lain, Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan yang lebih besar karena ukuran populasi dan kompleksitasnya, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Melalui implementasi kebijakan yang beragam, kedua negara berusaha untuk mengatasi problematika seperti kesenjangan akses pendidikan, kualitas guru, dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Dengan memahami perbandingan antara kedua sistem pendidikan ini, kedua negara dapat saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat mereka. Sinergi dan kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia dalam bidang pendidikan juga dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bersama dan memajukan sistem pendidikan di kedua negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Ampuan Haji, Brahim Bin, and Ampuan Haji,(2013) '*Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : Isu Dan Cabaran Di Brunei Darussalam*', SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 6.November
- Anwar,Ali.2008*Pembaharuan Pendidikan di Pesatren Lirboyo Kediri* ( Kediri: IAIT Press,)
- Asrohah,Hanun .1999*Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos,)
- Awang, Haji (2020) Asbol Bin, and Haji Mail, '*Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam* ', ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan.
- Daulay, Haidar Putar.2007*Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,)
- Fadil, Amran Khaidir, Suhendra,(2023) '*Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara Asean Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal*', Islamika:Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan, 5.1
- Haji Awang Mohd.2001*Jamil al-Sufri, Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam* (Brunei Darussalam: Kementrian Kebudayaan,)
- Helmiati Susiba, Hairunnas,(2022) '*Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional ( SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam* ', Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam,
- Isnaini Hairunnas,(2023), Septemiarti, '*Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Brunei*', Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5.1 4967
- Madjid,Nurchalis (1995)*Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Pustaka Paramadina.
- Maunah,Binti.2011*Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras,)
- Mulkhan,Abdul Munir 2003*Menggagas Pesantren Masa Depan* (Yogyakarta: Qirtas,)

- Najtama, Fikria (2018) '*Perkembangan Islam Di Brunei*', TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM, 10. September
- Rusdiana, Ahmad 2015 *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia,)
- Soebadio, Harjati "*Agama sebagai Sasaran Penelitian Filologi*", dalam Parsudi Suparlan (peny.), *Pengetahuan Budaya, Ilmu- ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1981/1982)
- Tim Penyusun Depag RI, 2004 *Sejarah Madrasah; Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Daprtemen Agama RI,)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,)
- Tjuparmah S, Komarudin dan Yoke 2000 *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara,)
- Yusran, Muhammad (2019) '*Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)*', Jurnal Al-Risalah